



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

KATA PENGANTAR vi

BAB I. PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Isu-isu Strategis 2

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 2

1.4 Sistematika Penulisan.....10

1.5 Langkah Perbaikan Internal 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 12

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja.....12

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 14

2.3 Struktur Program dan Kegiatan.....15

2.4 Perjanjian Kinerja.....17

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 32

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 32

3.2 Realisasi Anggaran 44

3.3 Inovasi 45

BAB IV. PENUTUP 48

4.1. Kesimpulan 48

4.2. Rekomendasi 49

LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. RKT

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1 : Data Jumlah Pegawai	5
Tabel 1.3.2 : Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.3.3 : Data ASN Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3.4 : Data Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3.5 : Rekapitulasi Investasi Barang.....	8
Tabel 1.3.6 : Dukungan Anggaran	9
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja	14
Tabel 2.2.1 : Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel 2.3 : Program dan Kegiatan	16
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja	18
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja	32
Tabel 3.1.1 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	34
Tabel 3.1.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	36
Tabel 3.1.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 3.1.4 : Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja.....	39
Tabel 3.1.5 : Analisis Efisiensi Sumber Daya	40
Tabel 3.1.6 : Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang	41
Tabel 3.2 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.3.1 :Bagan Struktur Organisasi	4
Gambar 2.5.1 :SSO	19
Gambar 2.5.2 :e-Planning	20
Gambar 2.5.3 :e-Budgeting	20
0Gambar 2.5.4 :e-RKO	21
Gambar 2.5.5 :e-Penatausahaan	21
Gambar 2.5.6 :e-Controlling	22
Gambar 2.5.7 :e-SIPD-RI	23
Gambar 2.5.8 :e-Layanan Biro Umum	24
Gambar 2.5.9 :Simpel	24
Gambar 2.5.10 :Sikendi	25
Gambar 2.5.11 :Sinona	26
Gambar 2.5.12 :e-Office	27
Gambar 2.5.13 :Sipena	28
Gambar 2.5.14 :Sapubarbar	29
Gambar 2.5.15 :Sipancar	30
Gambar 2.5.16 :PPID	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat menjadi tolok ukur dalam sisi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Semarang, 28 Januari 2026

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH



LAKSONO DEWANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP 198206212008121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas menyusun pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas menyusun pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan adanya permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Belum optimalisasi penyelenggaraan pelayanan umum menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan umum yang memadai serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten
 - a) Pelayanan Pimpinan terkait dengan pengendalian internal guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
 - b) Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah dan tamu Pimpinan. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum.

1.3. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tugas menyusun pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan;
4. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Rumah Tangga Setda, Bidang Humas dan Protokol, Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

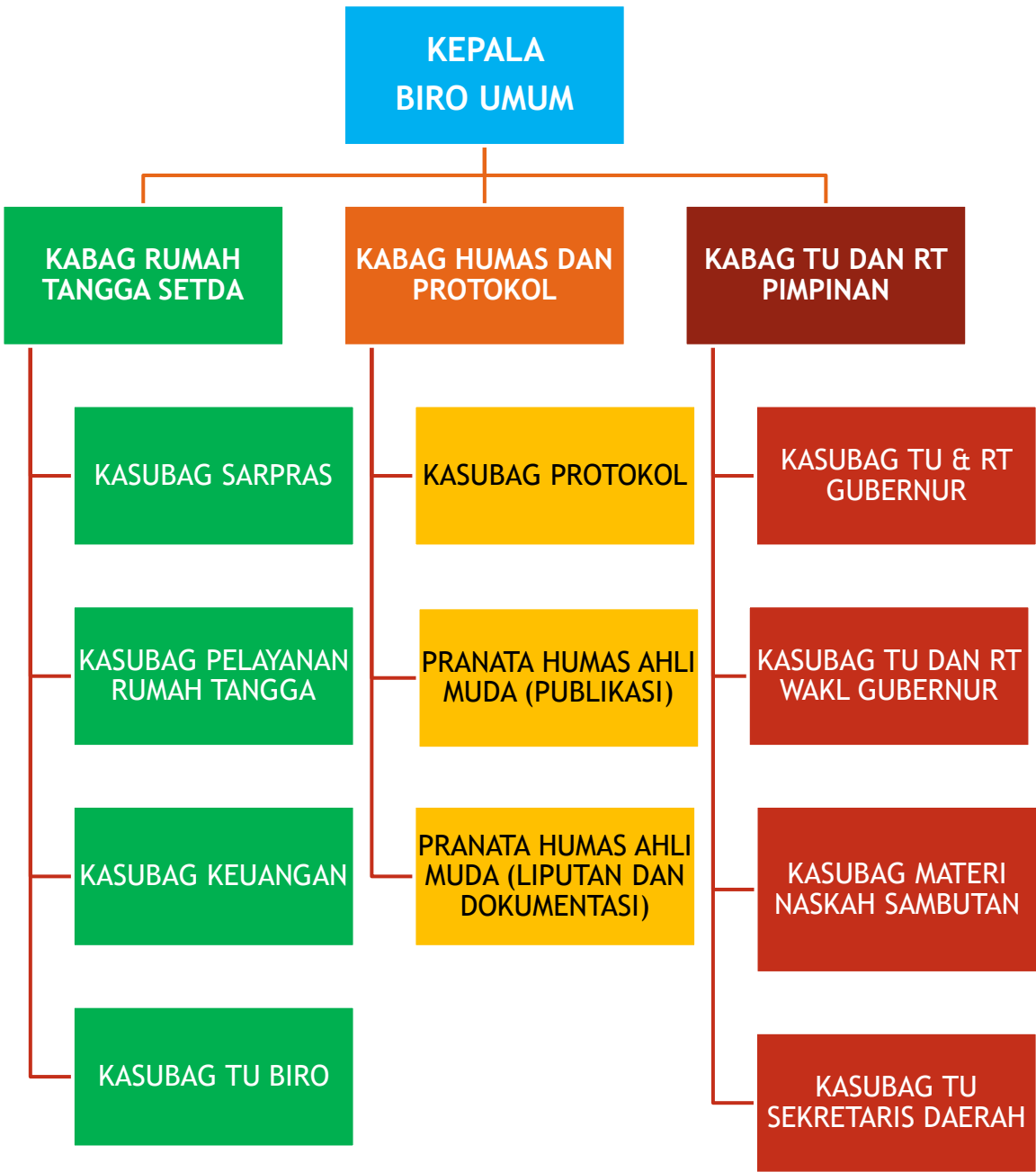
Struktur Organisasi Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi. Kepala Biro Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Pranata Humas Ahli Muda. Susunan Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Bagian Rumah Tangga SETDA membawahkan :
 - 1 Sub Bagian Sarana dan Prasarana ;
 - 2 Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga ;
 - 3 Sub Bagian Keuangan ;
 - 4 Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
 - 1 Pranata Humas Ahli Muda (Publikasi dan Hubungan Media);
 - 2 Pranata Humas Ahli Muda (Liputan dan Dokumentasi)
 - 3 Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan membawahkan :
 - 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur;

- 2 Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
- 3 Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan ; dan
- 4 Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.

Sebagaimana dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.3.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021

Dalam melaksanakan pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat, Biro Umum didukung dengan sumber daya manusia yang cukup handal, sarana dan prasarana sudah lengkap meskipun perlu peningkatan, untuk pelaksanaan pelayanan umum, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.1
DATA JUMLAH PEGAWAI

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Biro Umum	0	
2	Kabag RT SETDA	1	
3	Kabag TU dan RT Pimpinan	1	
4	Kabag Humas dan Protokol	1	
5	Subbag Sarpras	6	
6	Subbag Keuangan	10	
7	Subbag TU Biro	14	
8	Subbag Pelayanan RT	33	
9	Subbag Liputan	7	
10	Subbag Publikasi	7	
11	Subbag Protokol	9	
12	Subbag TU dan RT Gub	21	
13	Subbag TU dan RT Wagub	11	
14	Subbag TU Sekda	15	
15	Subbag TU Materi Naskah Pimpinan	4	
	Jumlah	140	

Tabel 1.3.2
DATA APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	19	Pria 101 orang, Perempuan 39 orang
2	Sarjana	63	
3	Akademi/D.III	11	
4	SLTA	40	
5	SMP	5	
6	SD	2	
	Jumlah :	140	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah didominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Selanjutnya untuk mengetahui data aparatur sipil negara berdasarkan golongan dapat disajikan tabel berikut ini :

Tabel 1.3.3
DATA APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	5	
2	Golongan III	93	
3	Golongan II	26	
4	Golongan I/PPPK	16	
	Jumlah :	140	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah didominasi dengan Golongan III. Selanjutnya untuk mengetahui data tenaga kontrak disajikan tabel berikut ini:

Tabel 1.3.4
DATA TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	1	Pria 56 orang, Perempuan 28 orang
2	Sarjana	51	
3	Akademi/D.III	7	
4	SLTA	25	
5	SMP	-	
6	SD	-	
	Jumlah :	84	

Tabel 1.3.5
REKAPITULASI INVENTARIS BARANG

No.	Kode Barang	Uraian	Jumlah	
			Volume	Harga
1	1.3.1.01	TANAH	15	161.603.197.490
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	38	12.530.872.816
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	331	91.712.474.795
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42	184.476.000
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.355	53.076.394.656
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.897	30.834.759.672
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13	204.665.000
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8	94.300.000
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	2.050	23.848.875.843
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	28	437.653.000
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	40	99.695.837.654
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	82.858.935
27	1.3.4.03	INSTALASI	-	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	-	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.798	606.089.961
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/ KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52	211.606.342
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
		JUMLAH	24.668	475.124.062.164

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025, Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.256.919.743.000,- sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.6
Dukungan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	256.919.743.000	
			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		
			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol		

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk rencana aksi, dari setiap sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5. LANGKAH PERBAIKAN INTERNAL

Untuk mengatasi permasalahan dan peningkatan pelayanan di Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah antara lain dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana (pemeliharaan kendaraan untuk pelayanan tamu, pemeliharaan lift, pemeliharaan AC, pemeliharaan meubelair, dan prasarana lainnya secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain bintek hubungan keprotokolan, sertifikasi public relation officer, sertifikasi desain grafis, sertifikasi sosial media, sertifikasi video editor, sertifikasi content creator, sertifikasi pengembangan website, sertifikasi editor jurnalis, sertifikasi kameramen, sertifikasi fotografer, sertifikasi reporter.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diperlukan 4 misi yaitu :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu:

"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

b. Sasaran

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Biro Umum mempunyai Sasaran yang akan dicapai yaitu :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, yang tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah						
1			Nilai IKM Layanan Biro Umum	77	78	78,5	80	82
2			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	-	-	100	100	100
3			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	-	100	100	100	100
4			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	-	100	100	100	100

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator maupun target dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2025, Untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Umum didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja dibawah ini :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	persentase	82%
2			Nilai IKM Layanan Biro Umum	persentase	82%
3			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	persentase	100%
4			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	persentase	100%

5			Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	persentase	100%
---	--	--	---	------------	------

Tabel 2.2.1
Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah	Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum	Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah,
		Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan	Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,

2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, untuk pencapaian dalam tahun tertentu. Melaksanakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			256.919.743.000
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	99.862.359.000
b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	1.089.757.000
c	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	20.000.000
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	12 Laporan	13.555.202.000
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	37.456.734.000
f	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	12 Laporan	28.546.608.000
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	14.851.144.000
h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	12 Laporan	26.880.385.000

i	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur, - Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur -Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Laporan	7.741.000.000
j	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan - Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan	12 Laporan	23.827.484.000
k	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	12 Laporan	3.089.070.000

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungankinerja setiap tahunnya.:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan : Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	persentase	82%
2		Nilai IKM Layanan Biro Umum	persentase	82%
3		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	persentase	100%
4		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	persentase	100%
5		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	persentase	100%

2.5. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

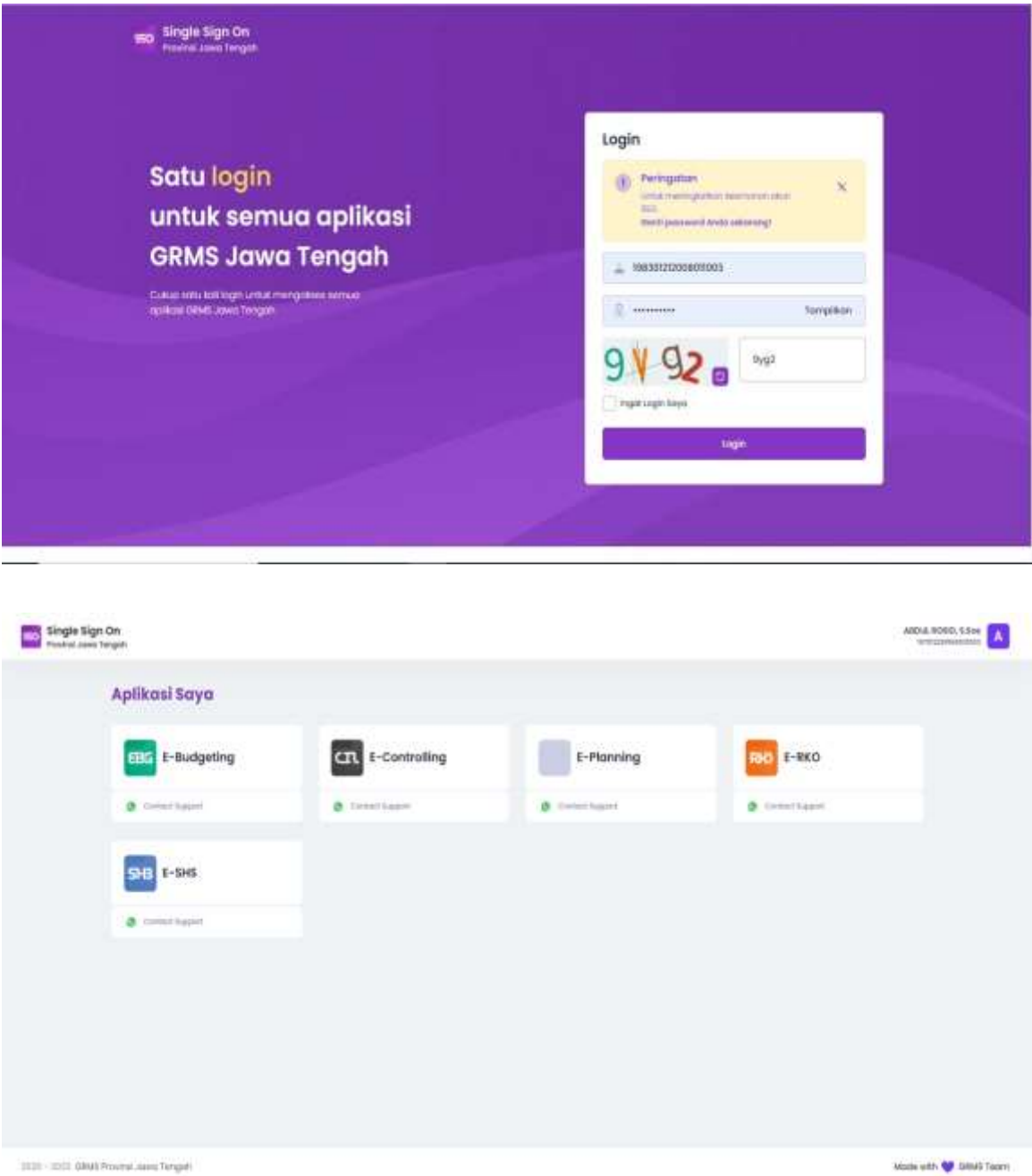
Guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan *good governance*, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib menggunakan aplikasi untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD, instrumen pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti di bawah ini :

2.5.1 SSO (Single Sign On) Satu Login untuk semua

SSO (Single Sign On) Satu Login untuk semua aplikasi GRMS (Government Resources Management System) Provinsi Jawa Tengah yang memuat beberapa aplikasi antara lain *e-budgeting*, *e-planning*, *e-RKO*, *e-penatausahaan*, dan *e-controlling* yang mendukung seluruh proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

<https://sso.jatengprov.go.id/aplikasi>

Gambar 2.5.1
Single Sign On Provinsi Jawa Tengah

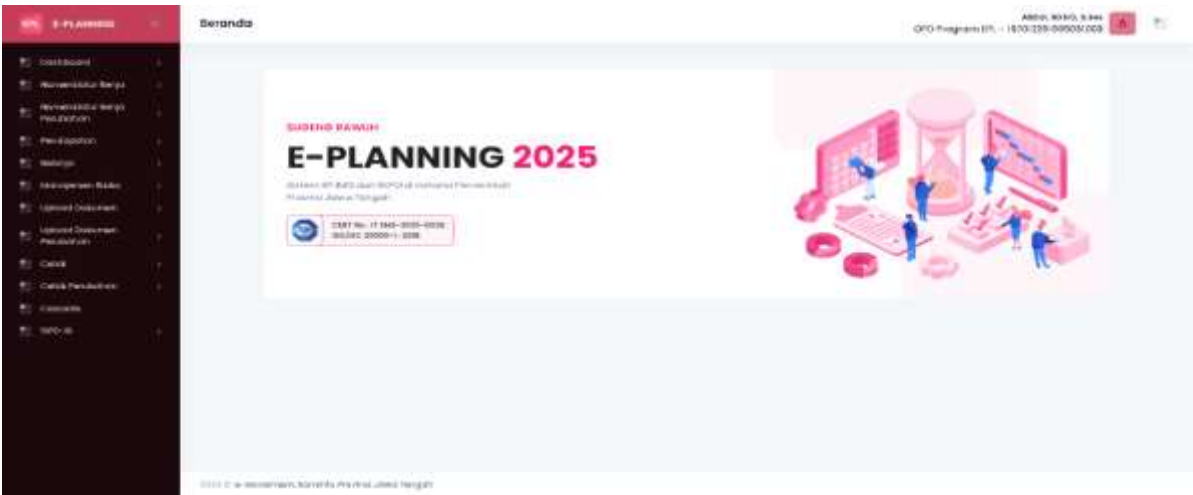


2.5.2 Aplikasi *e-Planning*.

e-Planning adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah

<https://2025.eplanning.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.2
e-Planning Provinsi Jawa Tengah



2.5.3 Aplikasi *e-Budgeting*,

e-Budgeting adalah Sistem Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Jawa Tengah

<https://2025.ebg.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.3
e-Budgeting Provinsi Jawa Tengah

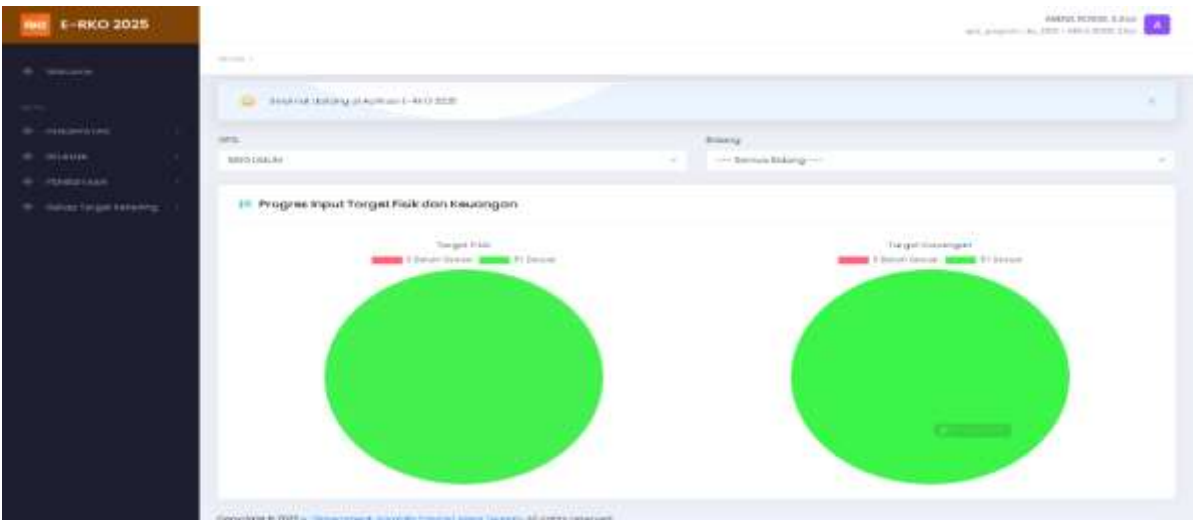


2.5.4 Aplikasi e-RKO

e-RKO (Rencana Kerja Operasional) adalah aplikasi untuk menentukan target fisik maupun keuangan

<https://2025.rko.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.4
e-RKO Provinsi Jawa Tengah

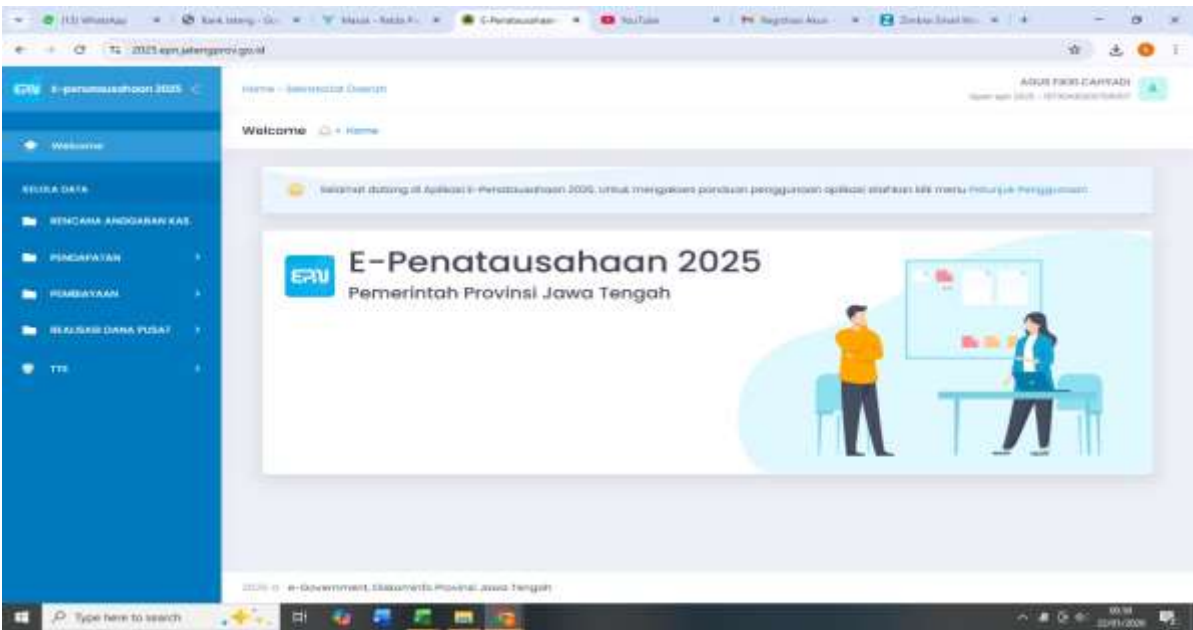


2.5.5 Aplikasi e-Penatausahaan

e-Penatausahaan adalah aplikasi yang mengakomodir proses penatausahaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah

<https://epenatausahaan.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.5
e-Penatausahaan Provinsi Jawa Tengah

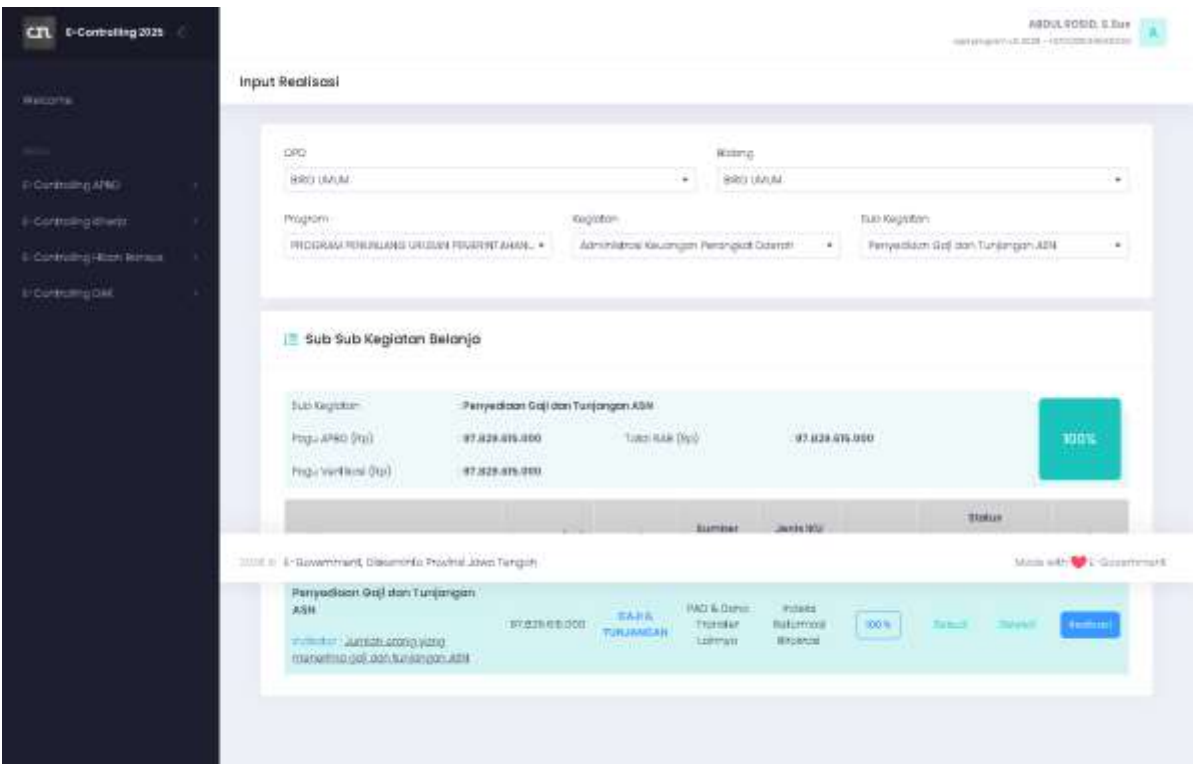


2.5.6 Aplikasi e-Controlling

Sistem yang dipakai dalam menjembatani antara perencanaan, pelaksanaan pekerjaan Provinsi Jawa Tengah

<https://2025.ctl.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.6
e-Controlling Provinsi Jawa Tengah

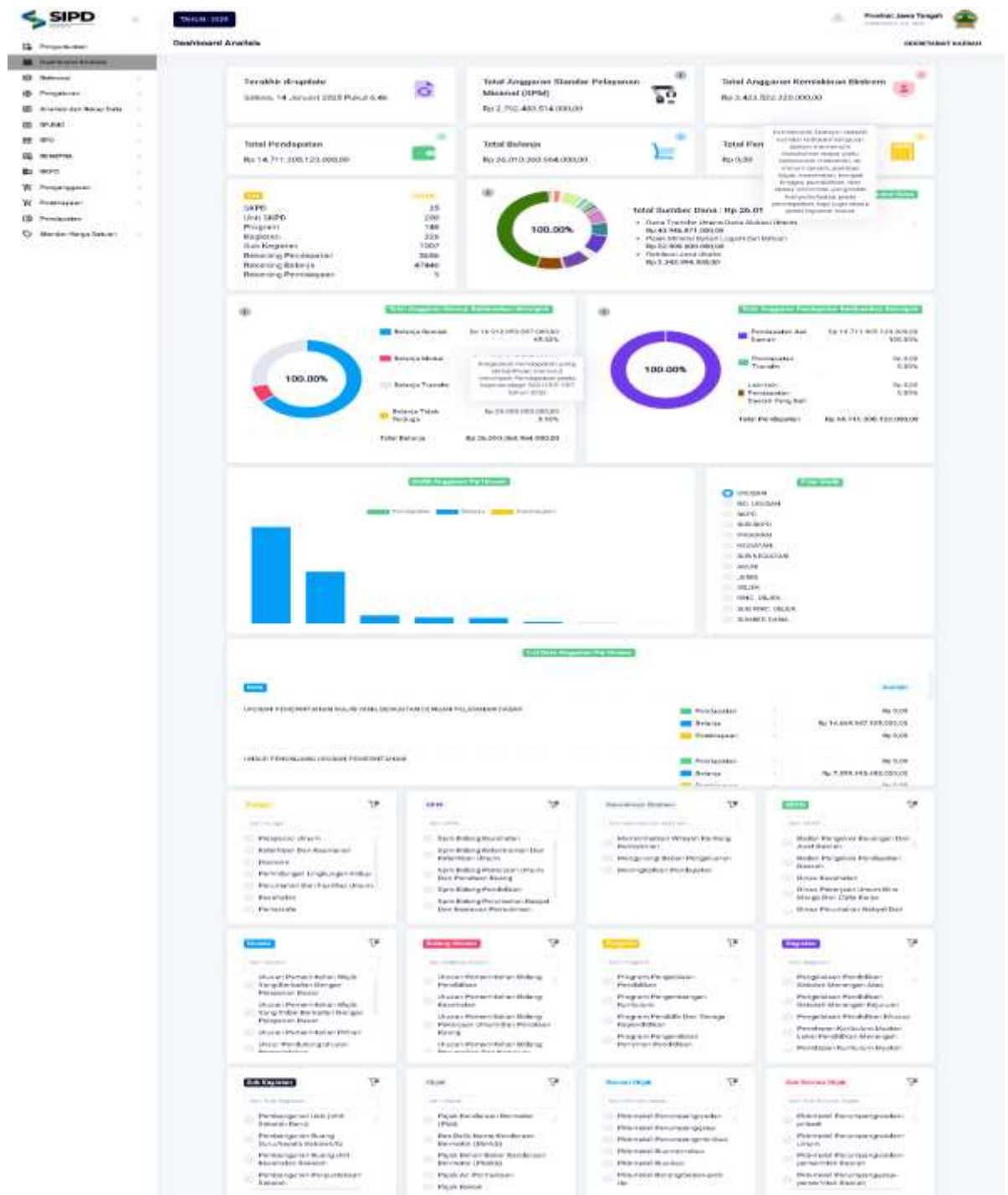


2.5.7 Aplikasi e-SIPD-RI

e-SIPD RI adalah platform digital yang dikembangkan untuk menyatukan semua data pemerintahan daerah dalam satu sistem terintegrasi. Fungsi utama sistem ini adalah memudahkan proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, sekaligus mendukung evaluasi kinerja secara nasional.

<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

Gambar 2.5.7
e-SIPD-RI



Selain aplikasi yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki aplikasi/sistem lokal yaitu sistem :

2.5.8 Aplikasi e-Layanan Biro Umum

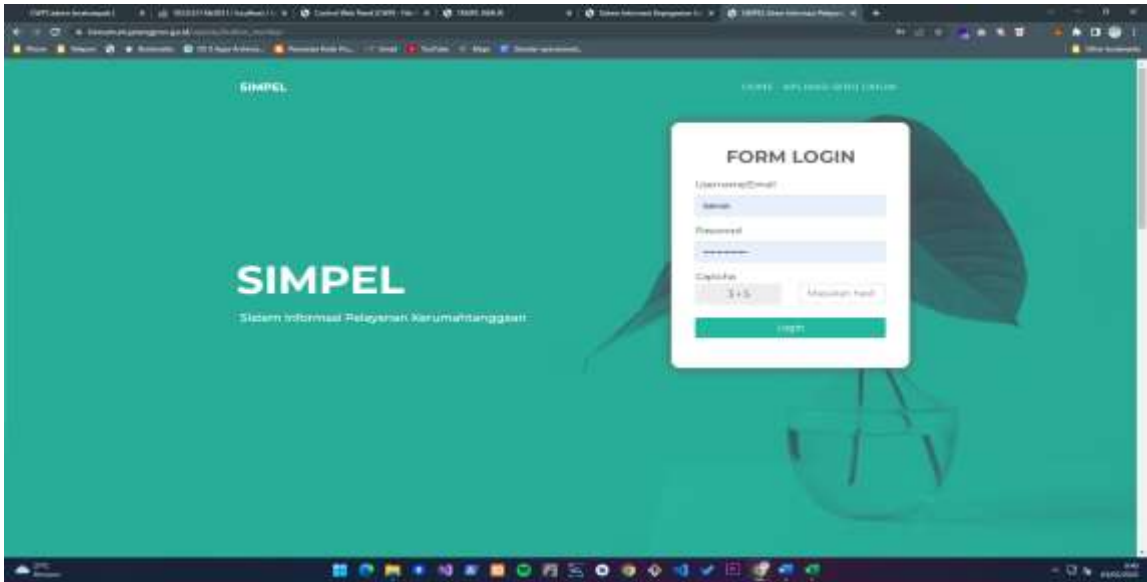
e-Layanan Aplikasi untuk peminjaman Gedung,Ruang Rapat, venue kepada masyarakat / SKPD yang dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah <http://biroumum.jatengprov.go.id/layanan/>

Gambar 2.5.8
e-Layanan Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah



2.5.9 Aplikasi Simpel (Sistem Informasi Pelayanan Kerumahtanggaan),
e-Simpel Sistem Informasi Pelayanan kerumahtanggaan adalah system informasi yang berfungsi untuk Mengakomodir Pelaporan Kerusakan Sarana Prasarana di lingkup setda Provinsi Jawa Tengah
<https://biro umum.jatengprov.go.id/sarpras>

Gambar 2.5.9
Simpel (Sistem Informasi Pelayanan Kerumahtanggaan)

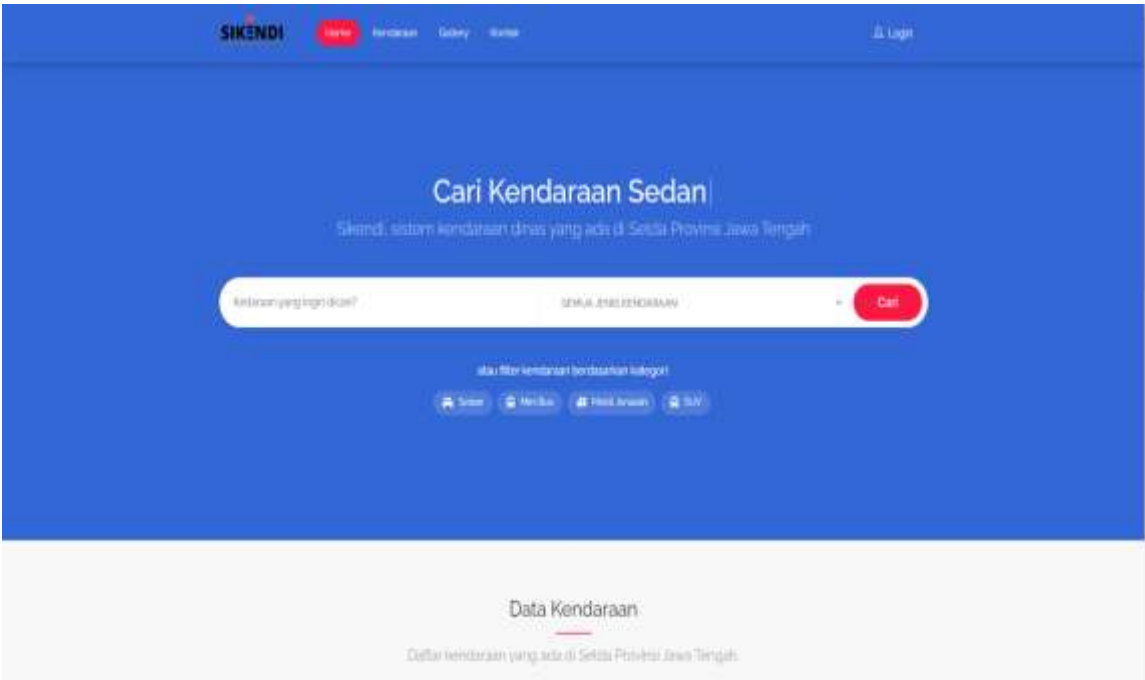


2.5.10 Aplikasi Sikendi (Sistem Informasi Kendaraan Dinas),

Sistem Informasi Kendaraan Dinas adalah sistem yang berfungsi untuk memmanagement kendaraan dinas terkait detail kendaraan dinas, Penanggung jawab kendaraan, Mutasi kendaraan, Pajak kendaraan. Peminjaman kendaraan tertentu bagi masyarakat

<https://biroumum.jatengprov.go.id/ekendaraan>

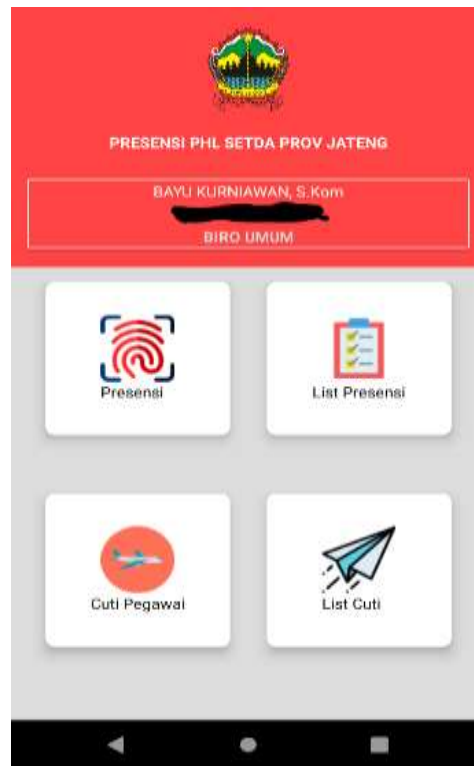
Gambar 2.5.10
Sikendi (Sistem Informasi Kendaraan Dinas)



2.5.11 Aplikasi Sinona

Sinona (Sistem Informasi Non ASN) adalah system informasi untuk Management Presensi NON ASN Berbasis Geo Location sesuai dengan lokasi kerja tenaga Non ASN ditempatkan, Cuti Pegawai Ijin pegawai yang berbasis Android.

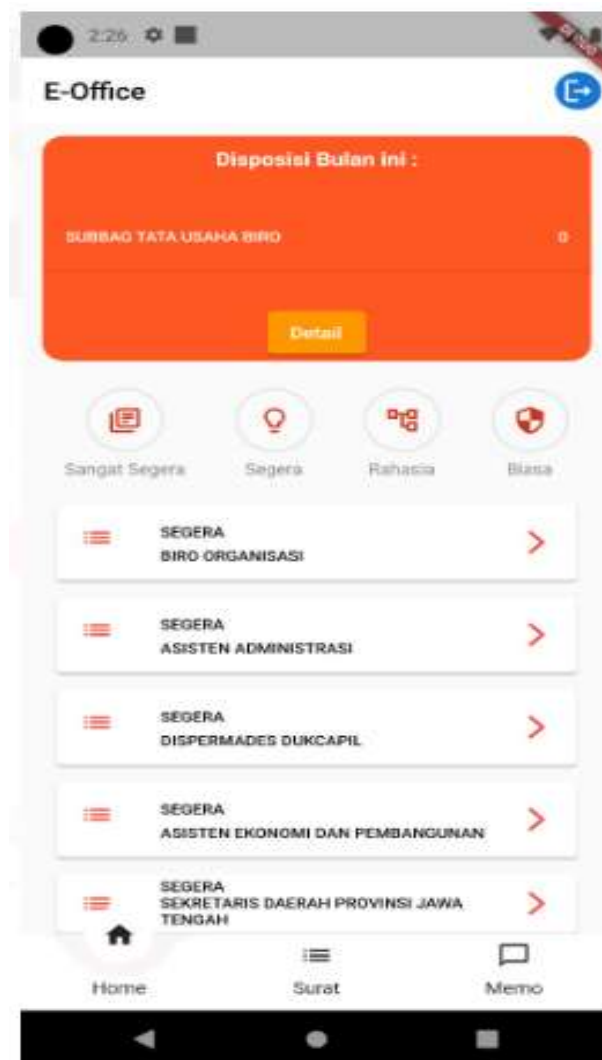
Gambar 2.5.11
Sistem Informasi Non ASN



2.5.12 Aplikasi e-Office

Aplikasi e-Office adalah aplikasi persuratan yang digunakan di lingkungan Biro Umum dimana aplikasi ini digunakan untuk manajemen surat masuk dan surat keluar, serta untuk melakukan manajemen disposisi dari pimpinan, untuk melakukan disposisi langsung melalui aplikasi berbasis android, dan disposisi akan langsung terdistribusikan mulai dari eselon 3, eselon 4 sampai dengan staf, Dimana pegawai yang mendapatkan disposisi akan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp. Dengan mendownload dari playstore.

Gambar 2.5.12
e-Office



2.5.13 Aplikasi SIPENA (Sistem Informasi Peminjaman Arsip)

SIPENA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses peminjaman arsip secara terintegrasi dan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan, persetujuan, hingga pengembalian arsip dapat dilakukan secara online dan terdokumentasi dengan baik.

Implementasi SIPENA memberikan manfaat antara lain:

- Mempercepat proses peminjaman arsip tanpa harus melalui proses manual.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.
- Menyediakan rekam jejak peminjaman arsip yang dapat dipantau secara real time.
- Mengurangi risiko kehilangan arsip dan meningkatkan tertib administrasi kearsipan.

Dengan adanya SIPENA, pengelolaan arsip di lingkungan Biro Umum menjadi lebih efisien, modern, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

<https://sipena.biroumum.jatengprov.go.id>

Gambar 2.5.13
Sistem Peminjaman Arsip



2.5.14 Aplikasi Sapubarbar (Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang)

Sapubarbar dikembangkan sebagai solusi digital dalam pengelolaan usulan kebutuhan barang dari masing-masing unit kerja. Aplikasi ini berfungsi sebagai media penampungan usulan sekaligus mendukung proses **verifikasi, validasi, dan realisasi kebutuhan barang** secara sistematis dan terkontrol.

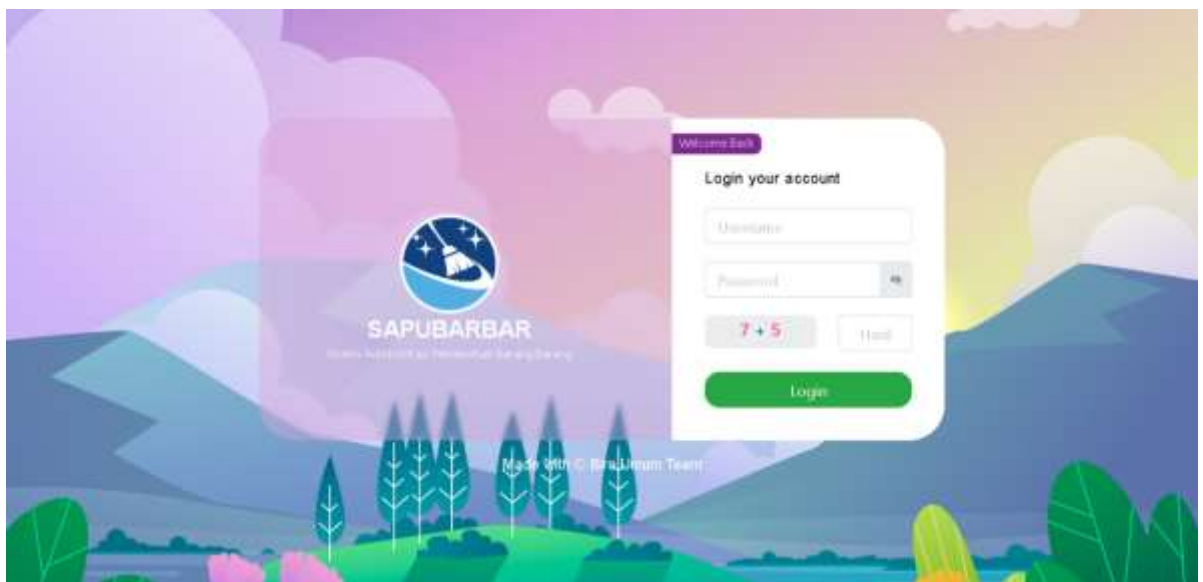
Manfaat utama Sapubarbar antara lain:

- Menyederhanakan proses pengajuan kebutuhan barang secara terpusat.
- Mendukung pengambilan keputusan melalui data usulan yang terdokumentasi dengan baik.
- Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemenuhan barang.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana.

Dengan Sapubarbar, proses administrasi pemenuhan barang di lingkungan Biro Umum menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan aset daerah.

<https://sapubarbar.biroumum.jatengprov.go.id>

Gambar 2.5.14
Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang



2.5.15 Aplikasi SIPANCAR (Sistem Informasi Pemantauan Pencairan)

SIPANCAR merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan pengendalian proses pencairan dokumen keuangan. Melalui digitalisasi sistem pemantauan, aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pengajuan dokumen pencairan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait.

Adapun manfaat penerapan SIPANCAR antara lain:

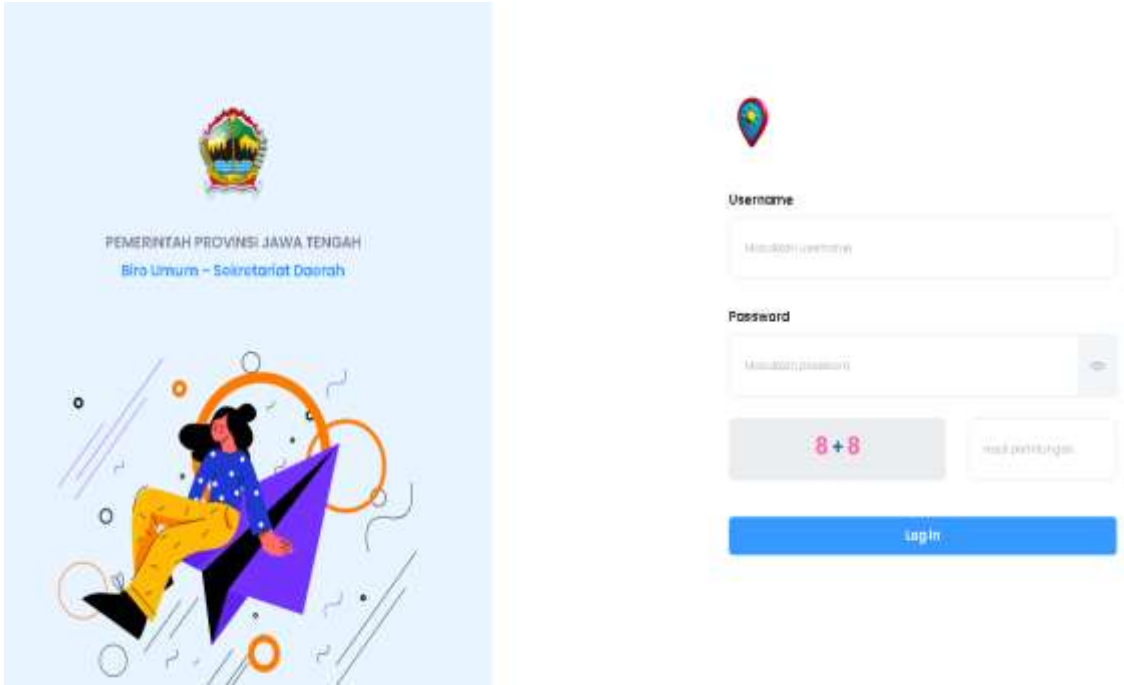
- Meningkatkan transparansi proses pengajuan dan pencairan dokumen keuangan.
- Mempermudah monitoring status dokumen pencairan.
- Mengurangi potensi keterlambatan dan miskomunikasi antar pihak.
- Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Implementasi SIPANCAR menjadi salah satu langkah konkret Biro Umum dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

<https://keuangan.eoffice.biroumum.jatengprov.go.id>

Gambar 2.5.15

Sistem Informasi Pemantauan Pencairan



2.5.16 Aplikasi PPID SETDA JATENG

Fungsi dari PPID Setda Jateng adalah Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan; <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>

Gambar 2.5.16
Sistem Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$;
- b. Tinggi : 76 – 90,99%;
- c. Sedang : 66 – 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Sesuai Renja Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan utama yaitu "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Umum selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki satu sasaran utama yaitu meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut tabel capaian kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	82%	81,45%	99,33%	84%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum	%	82%	81,45%	99,33%	84%

3		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100%	100%	100%	100%
4		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100%	100%	100%	100%
5		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata				99,73%	

Kinerja Biro Umum untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Umum sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Umum. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1.1 Perbandingan
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	82%	81,45%	99,33%	Baik	e-Controlling dan layanan penilaian Biro Umum
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum	82%	81,45%	99,33%	Baik	e-Controlling dan layanan penilaian Biro Umum
3		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%	100%	100%	Baik	e-Controlling
4		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%	100%	100%	Baik	e-Controlling
5		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%	100%	100%	Baik	e-Controlling
		Rata-rata			99,73%		

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah rata-rata realisasi capaiannya 99,73% dikategorikan Sangat Tinggi.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	77%	77,80%	101%	78%	82,20%	105,38%	78,5%	81,82%	104,2%	82%	81,96%	99,95%	82%	81,45%	99,33%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum	77%	77,80%	101%	78%	82,20%	105,38%	78,5%	81,82%	104,2%	82%	81,96%	99,95%	82%	81,45%	99,33%
3		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
4		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
5		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pelayanan Biro Umum semakin meningkat karena realisasi, capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 baik terbukti capaiannya 99,73% yang dikategorikan Sangat Tinggi.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.1.3 Perbandingan
Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda Daerah	81,45%	84%	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum	81,45%	84%	Tercapai
3		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%	100%	Tercapai
4		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%	100%	Tercapai
5		Persentase tingkat pelayanan umum, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%	100%	Tercapai

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta faktor pendukung;

Tabel 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Faktor Pendukung

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Realisasi		% Capaian	Analisis Keberhasilan	Faktor Pendukung
1	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	82%	81,45%	99,33%	Tingkat Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda, baik terbukti tingkat capaiannya 99,33%	Meningkatkan inovasi pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum	82%	81,45%	99,33%	Tingkat Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Biro Umum baik terbukti tingkat capaiannya 99,33%	Meningkatkan inovasi pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat
3		Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%	100%	100%		
4		Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%	100%	100%		

5		Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%	100%	100%		
		Rata-rata			99,73%		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mencapai 99,73% atau Sangat Tinggi didukung oleh terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja.

- 3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.1.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	100	100	100	256.919.743.000	238.221.493.954	92,72%	7,28%

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Biro Umum telah sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan anggaran Rp. 256.919.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 238.221.493.954,- atau 92,72%, efisiensi anggaran sebesar Rp.18.698.249.046,- atau 7,28%.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang
	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Layanan Biro Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Menunjang
2				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan	Menunjang
3				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 laporan	Menunjang
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	12 laporan	Menunjang
5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Menunjang

6				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	12 laporan	Menunjang
7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Menunjang
8				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	12 laporan	Menunjang
9				Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	-Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur, - Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumah tanggaan Wakil Gubernur -Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	12 laporan	Menunjang
10				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	12 laporan	Menunjang

					- Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan		
11				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	12 laporan	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 3 (tiga) indikator kinerja program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan dengan analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.919.743.000	238.221.493.954	92,72
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.862.359.000	88.489.420.597	88,61
b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.089.757.000	1.035.817.647	95,05
c	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	17.415.000	87,08
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.555.202.000	12.219.780.059	90,15
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.456.734.000	36.346.260.083	97,04
f	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	28.546.608.000	26.804.747.171	93,90
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.851.144.000	19.642.169.455	99,27
h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.880.385.000	25.022.928.634	93,09
i	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.741.000.000	7.732.115.011	99,89
j	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	23.827.484.000	23.646.365.644	99,24
k	Fasilitasi Keprotokolan	3.089.070.000	3.078.404.009	99,65

Pencapaian Anggaran dan Kegiatan Biro Umum telah sesuai target yang telah ditentukan dengan anggaran Rp. 256.919.743.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 238.221.493.954,- atau 92,72%, efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.698.249.046,- atau 7,28%.

3.3 INOVASI

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 membuat Inovasi Sipena, Sapubarbar dan Sipancar adalah aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Arsip, Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang dan Sistem Informasi Pemantauan Pencairan yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah dimana aplikasi ini digunakan untuk manajemen arsip, manajemen barang dan system pencairan, yang dapat diakses melalui web/link.

Aplikasi SIPENA (Sistem Informasi Peminjaman Arsip)

SIPENA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses peminjaman arsip secara terintegrasi dan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan, persetujuan, hingga pengembalian arsip dapat dilakukan secara online dan terdokumentasi dengan baik.

Implementasi SIPENA memberikan manfaat antara lain:

- Mempercepat proses peminjaman arsip tanpa harus melalui proses manual.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.
- Menyediakan rekam jejak peminjaman arsip yang dapat dipantau secara real time.
- Mengurangi risiko kehilangan arsip dan meningkatkan tertib administrasi kearsipan.

Dengan adanya SIPENA, pengelolaan arsip di lingkungan Biro Umum menjadi lebih efisien, modern, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

<https://sipena.biroumum.jatengprov.go.id>

Aplikasi Sapubarbar (Sistem Administrasi Pemenuhan Barang-Barang)

Sapubarbar dikembangkan sebagai solusi digital dalam pengelolaan usulan kebutuhan barang dari masing-masing unit kerja. Aplikasi ini berfungsi sebagai media penampungan usulan sekaligus mendukung proses verifikasi, validasi, dan realisasi kebutuhan barang secara sistematis dan terkontrol.

Manfaat utama Sapubarbar antara lain:

- Menyederhanakan proses pengajuan kebutuhan barang secara terpusat.
- Mendukung pengambilan keputusan melalui data usulan yang terdokumentasi dengan baik.
- Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemenuhan barang.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kebutuhan sarana dan prasarana.

Dengan Sapubarbar, proses administrasi pemenuhan barang di lingkungan Biro Umum menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan aset daerah.

<https://sapubarbar.biroumum.jatengprov.go.id>

Aplikasi SIPANCAR (Sistem Informasi Pemantauan Pencairan)

SIPANCAR merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung transparansi dan pengendalian proses pencairan dokumen keuangan. Melalui digitalisasi sistem pemantauan, aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pengajuan dokumen pencairan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait.

Adapun manfaat penerapan SIPANCAR antara lain:

- Meningkatkan transparansi proses pengajuan dan pencairan dokumen keuangan.
- Mempermudah monitoring status dokumen pencairan.
- Mengurangi potensi keterlambatan dan miskomunikasi antar pihak.
- Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Implementasi SIPANCAR menjadi salah satu langkah konkret Biro Umum dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi.

<https://keuangan.eoffice.biroumum.jatengprov.go.id>

Untuk peningkatan pelayanan umum akan dilakukan perbaikan PPID Setda Provinsi Jawa Tengah dengan mengunggah Dokumen Perencanaan dan Hasil-hasil Pelaksanaan Kegiatan serta dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dapat diakses melalui web <http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>

Selama tahun 2025, pengelolaan *website* PPID telah mengalami beberapa perubahan, meliputi perubahan pada halaman konten informasi berkala, halaman informasi setiap saat, penambahan halaman statistik jumlah permohonan informasi, migrasi tampilan/*redesign website* PPID, penambahan halaman aduan/formulir *online* layanan disabilitas, dan penambahan halaman statistik aduan masyarakat.

Adapun perubahan pada halaman konten informasi berkala yang dilakukan pada bulan Januari-Februari 2025 dan halaman konten informasi setiap saat yang dilakukan pada bulan Maret-April 2025 adalah merubah tata letak halaman konten informasi berkala agar lebih *user friendly* serta memudahkan *user* dalam memahami dan mengetahui informasi yang disampaikan.

Sedangkan penambahan halaman yang memuat statistik jumlah permohonan informasi pada bulan Mei-Juni 2025 dan penambahan halaman statistik aduan masyarakat yang dilakukan pada periode November-Desember 2025 berfungsi untuk menampilkan hasil *monitoring* jumlah permohonan informasi dari masyarakat yang diterima dan ditolak, serta jumlah laporan aduan masyarakat yang dikemas dalam bentuk statistik, sehingga hal ini dapat dijadikan bahan analisis pengembangan *website* PPID ke depannya.

Website PPID sendiri pada tahun 2025 juga mengalami *redesign* tampilan mulai dari menu *navigation bar* (navbar), logo, *template* konten, dan bagian *footer website* sehingga tampilannya menjadi lebih *fresh* dan kekinian. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam mengunjungi, mencari informasi, dan mengajukan aduan pada *website* PPID. Selain itu, penambahan halaman baru, yakni formulir *online* layanan disabilitas yang memanfaatkan *webcam* dan *voice recorder* secara *realtime* diharapkan mampu menunjang masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan menggunakan *website* PPID.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil kinerja dan analisisnya sebagaimana pada BAB III dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar 99,73% yang dapat dikategorikan "Sangat Tinggi".

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan capaian 99,73%
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menghasilkan capaian 99,73% atau lebih, hal ini dapat diartikan capaian masuk kedalam kategori Sangat Tinggi.
- c. Hasil dari membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah pada tahun 2025 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah tercapai.
- d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta faktor pendukung dapat menghasilkan capaian 99,73%.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menghasilkan capaian 99,73% yang dapat dikategorikan Sangat Tinggi.
- f. Analisis program/kegiatan yang sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Pencapaian Realisasi Anggaran dan Kegiatan Biro Umum telah sesuai target yang telah ditentukan dengan anggaran Rp. 256.919.743.000,- realisasi fisik 99,73% dan realisasi keuangan Rp. 238.221.493.954,- atau 92,72%, efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.698.249.046,- atau 7,28%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan :

1. Informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum.
2. Adanya *feedback* atau umpan balik agar hasil (*outcomes*) yang diharapkan dari setiap program/kegiatan dapat memberikan dampak yang baik bagi *stakeholders* dan *customers* Biro Umum dan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja Biro Umum dalam mendukung mewujudkan tujuan strategis yaitu “Memberikan kontribusi dan mendorong terwujudnya *Good Governance* di Jawa Tengah”.
3. Target kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik karena adanya instrumen pendukung selain GRMS/SSO juga ada aplikasi layanan Biro Umum yang bisa diakses oleh masyarakat.

2. REKOMENDASI

Untuk mengatasi permasalahan dan peningkatan pelayanan di Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Semarang ²⁸ Januari 2026

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH


LAKSONO DEWANTO, S.E, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198206212008121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 8311174 (20 saluran)
Faksimile 8311266 Laman <http://www.jawatengah.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, S.E, M.M.
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, S.E, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO UMUM


HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800919 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Biro umum	82,5%
5	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Capaian Indeks Manajemen Risiko	3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 250,335.536.000,-	Sumber Anggaran APBD Tahun 2025

Semarang, 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO UMUM

HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800919 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 8311174 (20 Saluran)
Faksimile 8311266 Laman <http://www.jawatengah.go.id>

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Biro Umum	82,5%
5	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Capaian Indeks Manajemen Risiko	3

Semarang, 24 Januari 2025

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH


HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800919 199912 1 001